

## RINGKASAN

Memiliki jumlah penduduk yang besar dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi sebuah negara. Namun adanya jumlah penduduk yang besar tanpa didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai akan menjadi beban bagi negara karena dapat memunculkan berbagai macam permasalahan sosial, misalnya adanya pengangguran yang tinggi. Seperti halnya pada tahun 2021 mencapai angka 12,85% jumlah ini belum sesuai dengan target yang diproyeksikan presiden pada tahun 2021 mencapai 7,7%-9,1%, oleh karena itu Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan salah satunya melalui program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan di setiap kabupaten dan kota. Melalui penelitian ini dapat dilihat mengenai bagaimana keberhasilan Implementasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyumas.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari suatu program yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam buku "*Policy Implementation and Bureaucracy*" terdapat 2 pendekatan implementasi kebijakan yaitu *Compliance* (Kepatuhan) dan *What's Happening* (Apa Yang Terjadi). Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada aspek *compliance*, program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan BLK Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena BLK Kabupaten Banyumas hanya melaksanakan pelatihan secara *Off The Job Training* dan belum melaksanakan pelatihan secara *On The Job Training* seperti halnya yang telah tertuang dalam Peraturan yang berlaku secara sepenuhnya telah dipatuhi oleh BLK Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada aspek *What's Happening* dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terhadap proses implementasi program PBK yaitu adanya hubungan kerjasama BLK Kabupaten Banyumas dengan pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan instruktur, prasarana pelatihan dan tingkat ketertarikan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu terdapatnya pengurangan anggaran sehingga menyebabkan jumlah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan berkurang dari segi jumlah kapasitas, angkatan dan kejuruan yang diselenggarakan, dan adanya kekurangan dalam biaya perawatan sarana dan prasarana di *workshop* pelatihan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Kabupaten Banyumas telah mencapai tujuan program yang telah diatur peraturan. Namun masih diperlukan peningkatan agar pelaksanaan program Pelatihan Berbasis Kompetensi di BLK Kabupaten Banyumas dapat menjadi lebih maksimal dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Banyumas pada khususnya.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

## SUMMARY

*Having a large population can provide a number of advantages for a country. However, the existence of a large population without the support of adequate quality human resources will become a burden for the state because it can lead to various kinds of social problems, for example high unemployment. As in 2021 it reached 12.85%, this number was not in accordance with the target projected by the president in 2021 to reach 7.7% -9.1%, therefore the Government of Indonesia is trying to overcome employment problems, one of which is through the Based Training program. Competence held in every district and city. Through this research, it can be seen how successful the implementation of the Competency-Based Training Program is at the Vocational Training Center in Banyumas Regency.*

*Policy implementation is the implementation of a program that is intended to achieve the objectives of the established policy. In this study, referring to implementation theory according to Ripley and Franklin in the book "Policy Implementation and Bureaucracy", there are 2 approaches to policy implementation, namely Compliance and What's Happening (What Happens). Then the method used in this study is qualitative with data sources through interviews, observation and documentation.*

*The results of this study indicate on the aspect of compliance that the Competency-Based Training program held by BLK Banyumas Regency has not fully complied with the applicable regulations. This is because the Banyumas Regency BLK only carries out Off The Job Training and has not carried out On The Job Training as stated in the applicable regulations and has been fully complied with by the Banyumas Regency BLK. Furthermore, in the What's Happening aspect in its implementation there are supporting factors and inhibiting factors. The supporting factor for the process of implementing the PBK program is the cooperative relationship of the Banyumas Regency BLK with external parties to meet the needs of instructors, training infrastructure and community interest. The inhibiting factor is the reduction in the reduction so that the number of training carried out decreases in terms of the number, amount and training held, and the lack of maintenance and infrastructure costs in the training workshop.*

*The conclusion of this research is that the implementation of the Competency-Based Training program at BLK Banyumas Regency has achieved the program objectives that have been regulated by regulations. However, improvements are still needed so that the implementation of the Competency-Based Training program in Banyumas Regency BLK can be more optimal in overcoming unemployment problems in Banyumas Regency in particular.*

*Keywords: Public Policy, Implementation, Competency Based Training Program*